



**RANCANGAN AWAL**  
**Rencana Kerja**  
**Perangkat Daerah**  
**BPSDM Provinsi DKI Jakarta**  
**Tahun 2023**



Jakarta  
Public Policy  
Center



# KATA PENGANTAR



## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas selesainya penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Ranwal Renja) Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 dengan baik.

Renja merupakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Secara substansi, dokumen Renja BPSDM Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 memuat hasil evaluasi Renja tahun 2021, tujuan dan sasaran BPSDM Tahun 2022, serta rencana kerja dan pendanaan BPSDM Tahun 2023.

Dokumen Ranwal Renja BPSDM Tahun 2023 masih terdapat kekurangan yang membutuhkan perbaikan dan penyempurnaan sebagai pelaksanaan urusan Peningkatan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Oleh karena itu, adanya rekomendasi yang konstruktif terhadap identifikasi permasalahan, arah kebijakan, program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja, penyesuaian dengan sasaran dan prioritas nasional, serta identifikasi program dan kegiatan menurut kewenangan Provinsi dan Kota/Kabupaten sangat diharapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dan memberikan dukungan dalam penyusunan dokumen Ranwal Renja BPSDM Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023. Semoga ridho Allah SWT menyertai dalam pelaksanaan Renja BPSDM Tahun 2023.

Jakarta, 2022  
Kepala BPSDM Provinsi  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



Mochamad Miftahulloh Tamary  
NIP 197812131997111001



# IKHTISAR EKSEKUTIF (*EXECUTIVE SUMMARY*)



## IKHTISAR EKSEKUTIF (EXECUTIVE SUMMARY)

Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja (Ranwal Renja) BPSDM Tahun 2023 berisi evaluasi kinerja BPSDM Tahun 2021, Identifikasi Permasalahan BPSDM Tahun 2023, Sasaran Kerja Prioritas BPSDM Tahun 2023, serta Rincian Program, Kegiatan dan Anggaran Indikatif Kegiatan BPSDM Tahun 2023.

Berdasarkan evaluasi kinerja BPSDM Tahun 2021 dan Isu-isu Strategis di dalam Renstra BPSDM Tahun 2023-202, maka isu-isu penting yang perlu diselesaikan oleh BPSDM pada tahun 2023 antara lain :

1. Meningkatkan kualitas Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur;
2. Mendorong kegiatan pengembangan Sumber Daya Manusia di lingkungan Provinsi DKI Jakarta melalui UPT PPKKP - BLUD *Jakarta Public Policy Center* (JPPC).

Dalam menjawab isu-isu tersebut Ranwal Renja BPSDM Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 fokus terhadap peningkatan kualitas Pengembangan Kompetensi SDM tersebut akan mendorong tercapainya indikator sasaran RPJMD Provinsi DKI Jakarta yaitu Indeks Profesionalitas ASN dan Sistem Merit.

Pada Renja 2023 BPSDM terdapat 3 Program, 7 Kegiatan, 25 Sub Kegiatan, serta 25 Indikator Kinerja sub kegiatan pada 1 Sekretariat, 3 Bidang dan 2 UPT (termasuk UPT PPKKP yang berupa BLUD JPPC). Lebih lanjut Dokumen Ranwal Renja ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Dokumen Renja BPSDM Tahun 2023 dan diharapkan dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan sesuai Peraturan Perundang-undangan



# DAFTAR ISI





## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF ( <i>EXECUTIVE SUMMARY</i> ).....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	2
1.2 DASAR HUKUM.....	2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN.....	3
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN.....	4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA BPSDM TAHUN 2021.....	6
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPSDM TAHUN 2021 DAN CAPAIAN RENSTRA BPSDM SAMPAI DENGAN TAHUN 2021.....	7
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN BPSDM.....	15
2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI BPSDM.....	20
BAB III TUJUAN DAN SASARAN BPSDM TAHUN 2023.....	22
3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL.....	23
3.1.1 Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023.....	23
3.1.2 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs).....	23 3.2
TUJUAN DAN SASARAN RANWAL RENJA BPSDM.....	24
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN BPSDM.....	26
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BPSDM TAHUN 2023.....	28
BAB V PENUTUP.....	31
A. LAMPIRAN REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA BPSDM 2023.....	A
B. LAMPIRAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD/UKPD BPSDM TAHUN 2023.....	A



# DAFTAR GAMBAR







## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs).....23



# DAFTAR TABEL





## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Realisasi Capaian Tahun 2021 dan Perkiraan Capaian Tahun 2022 Program BPSDM.....	9
Tabel 2. 2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BPSDM 2021 .....	14
Tabel 2. 3 Pencapaian Kinerja Pelayanan BPSDM s.d. Tahun 2021 .....	17
Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPSDM Tahun 2023-2026 .....	25
Tabel 4. 1 Rencana Kerja BPSDM Tahun 2023 .....	30



# PENDAHULUAN

---

Latar Belakang, Dasar Hukum, Maksud dan Tujuan,  
Sistematika Penulisan



## 1.1 LATAR BELAKANG

Rancangan Awal Rencana Kerja (Ranwal Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Penyusunannya berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib menyusun Renja sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Hal tersebut ditegaskan kembali dalam Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang dalam pasal 15 Ayat (1) mengamatkan bahwa "Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah".

Proses penyusunan Ranwal Renja BPSDM Provinsi DKI Jakarta digunakan sebagai salah satu acuan dalam penyusunan Rancangan Awal RKPD Provinsi DKI Jakarta. Selain itu juga dengan mempertimbangkan hasil evaluasi terhadap Renja BPSDM Tahun 2021, Target Kinerja tahun 2023 dalam Renstra BPSDM Tahun 2023-2026 dan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional.

## 1.2 DASAR HUKUM

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Ranwal Renja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2023, adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Terpadu;
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017 – 2022;
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
11. Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022
12. Peraturan Gubernur Nomor 293 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Sertifikasi Profesi Pegawai;
13. Peraturan Gubernur Nomor 111 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
14. Peraturan Gubernur Nomor 113 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan Kompetensi dan Kebijakan Publik

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Ranwal Renja BPSDM Tahun 2023 disusun untuk mewujudkan target kinerja tahun 2023 dengan mengalokasikan sumber daya yang dimiliki. Adapun tujuan penyusunan Ranwal Renja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI

Jakarta Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Menjabarkan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia ke dalam rencana operasional tahunan;
2. Menyediakan arahan/pedoman bagi aparatur Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun 2023;
3. Menjadi alat ukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan tugas Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

#### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dokumen Ranwal Renja BPSDM tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut

##### **BAB 1 : Pendahuluan**

Pada bab ini dijabarkan penjelasan ringkas tentang Renja BPSDM, keterkaitan antara Ranwal Renja dengan Rencana Strategis (Renstra) BPSDM, serta proses penyusunan Renja.

##### **BAB 2 : Hasil Evaluasi Renja BPSDM Tahun 2021**

Bab ini berisi hasil evaluasi pelaksanaan Renja BPSDM Tahun 2021 (n-2) dan Capaian Renstra sampai dengan Tahun 2021, analisis kinerja pelayanan BPSDM. dan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BPSDM.

##### **BAB 3 : Tujuan dan Sasaran BPSDM Tahun 2023**

Pada bab ini dijabarkan penelaahan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi BPSDM, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BPSDM yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra BPSDM, Program dan Kegiatan BPSDM.

##### **BAB 4 : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah BPSDM Tahun 2023**

Bab ini memuat Rincian Program, Kegiatan, dan Anggaran Indikatif BPSDM Tahun 2023.

##### **BAB 5 : Penutup**

Bab ini berisi uraian penutup yang terdiri atas catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.



## HASIL EVALUASI RENJA BPSDM TAHUN 2021

---

Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Capaian Renstra sampai dengan Tahun 2021, Analisis Kinerja Pelayanan, Isu- Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi





## 2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPSDM TAHUN 2021 DAN CAPAIAN RENSTRA BPSDM SAMPAI DENGAN TAHUN 2021

Pada bagian ini menjelaskan tentang evaluasi terhadap pelaksanaan Renja BPSDM Tahun 2021 dan Capaian Renstra BPSDM pada Tahun 2021. Fungsi evaluasi ini adalah dalam rangka penyediaan informasi-informasi yang berguna untuk mengidentifikasi permasalahan, isu-isu strategis, program dan kegiatan Renja BPSDM Tahun 2023.

Evaluasi atau reviu dilakukan terhadap realisasi program dan kegiatan BPSDM Tahun 2021 serta realisasi target sasaran Renstra BPSDM pada Tahun 2021. Reviu hasil evaluasi pelaksanaan Renja BPSDM Tahun 2021 ditinjau dari capaian program dapat dilihat dalam Tabel 2.1.

Terdapat 3 (tiga) program utama pada 2 (dua) urusan yang diampu oleh BPSDM yaitu:

- a. Urusan Kepegawaian, digunakan bersama oleh BPSDM dan BKD
  - i. Program Kepegawaian Daerah
- b. Urusan Pendidikan dan Pelatihan
  - i. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
  - ii. Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Realisasi capaian masing-masing program pada kedua urusan tersebut tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2. 1 Target, Realisasi dan Capaian Tahun 2021 Program BPSDM

No	Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	TAHUN 2019			TAHUN 2020			TAHUN 2021		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Indeks profesionalitas ASN (Dimensi Kompetensi)	Jumlah total hasil perkalian dari bobot dimensi/indikator dikalikan skor/nilai masing-masing jawaban dimensi/indikator yang dilakukan secara mandiri. Sumber data : SIMPEG dan SAPK	35,98	39,17	109 %	34	30,82	90,06 %	31,2	38.63	123,81 %



Berdasarkan tabel di atas, semua capaian indikatornya baik yakni melampaui target. Secara rinci hasil evaluasi pelaksanaan Renja BPSDM dan pencapaian Renstra BPSDM sampai dengan Tahun 2021, dapat dilihat pada tabel 2.2. Dalam tabel dimaksud dapat dilihat capaian masing-masing kegiatan BPSDM sampai dengan Tahun 2021.

Tabel 2. 2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja  
BPSDM 2021

NO	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA TAHUN 2023		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s.d Tahun 2020		Target kinerja dan anggaran Renja Tahun 2021		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran Renja yang dievaluasi		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra s.d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra s.d Tahun 2021		Unit Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I	II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp		
											K	Rp	K	Rp	K	Rp							K	
<b>TERSAJI DALAM LAMPIRAN A REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA BPSDM 2021</b>																								

## 2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN BPSDM

Analisis capaian kinerja BPSDM dilakukan berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Pencapaian Kinerja Pelayanan BPSDM terdapat dalam Tabel 2.3. Kinerja BPSDM dalam mengemban urusan pengembangan sumber daya manusia diukur dengan IKK seperti yang terdapat dalam Tabel 2.3.

Tabel 2. 3 Pencapaian Kinerja Pelayanan BPSDM s.d.  
Tahun 2021

No	Indikator Kinerja Utama (IKK)	Rumus	Target				Realisasi			Proyeksi	Catatan Analisis
			2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2022	
1	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat PD yang ada x 100%	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas PD yang relevan dengan urusan terkait, Jumlah Pejabat yang memenuhi persyaratan Diklatpim sesuai penjenjangan

## 2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI BPSDM

Isu Strategis Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 – 2026 antara lain :



Dengan kedudukan DKI Jakarta sebagai ibukota negara yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelayanan dengan standarisasi tinggi menjadi tuntutan masyarakat yang lebih luas. Dengan kedudukan yang demikian, DKI Jakarta menjadi barometer bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada umumnya dalam mengelola birokrasi dalam melayani masyarakat.

Oleh karena itu, Isu Strategis Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadi salah satu penopang utama berhasil tidaknya upaya memperbaiki layanan publik dalam kerangka peningkatan kinerja dan penyelenggaraan birokrasi yang lebih akuntabel. Permasalahan yang terjadi dalam pelayanan publik berhubungan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi DKI Jakarta selama ini yang harus terus diperbaiki guna meningkatkan efisiensi, efektivitas dan transparansi serta pembenahan budaya kerja yang mengutamakan kompetensi, profesionalisme, dan kemampuan menyelesaikan permasalahan ibukota bagi seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pengelolaan kompetensi aparatur oleh BPSDM menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam memperbaiki penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan yang menyejahterakan.

Strategi dan arah kebijakan pada dasarnya adalah upaya sinergis untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Strategi merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan BPSDM dan dalam rangka mewujudkan sasaran RPJMD. Strategi untuk mencapai tujuan BPSDM Provinsi DKI Jakarta dihasilkan dari hasil analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunities, Threat) untuk memahami peta kekuatan dan kelemahan lingkungan internal dan eksternal.

Strategi dan arah kebijakan juga dirumuskan dengan memerhatikan atau sebagai jawaban/solusi atas (analisis) permasalahan dan isu strategis tugas dan fungsi BPSDM dalam mendukung peningkatan kompetensi SDM Aparatur DKI Jakarta. Di samping itu, strategi dan arah kebijakan juga diselaraskan dengan strategi dan arah kebijakan dalam RPJMD, khususnya yang berhubungan dengan reformasi birokrasi dalam upaya meningkatkan integritas dan perbaikan layanan aparatur.

Dengan memerhatikan strategi dan arah kebijakan RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 dan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran BPSDM Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026, dirumuskan strategi Renstra BPSDM Tahun 2023-2026, sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur, dan
2. Peningkatan kapasitas kelembagaan BPSDM Provinsi DKI Jakarta.

Kedua strategi tersebut merupakan representasi dari tugas dan fungsi BPSDM yang diselenggarakan oleh seluruh bidang dan sekretariat di lingkungan BPSDM dalam mewujudkan tujuan dan sasaran. Adapun hubungan antara tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan BPSDM Provinsi DKI Jakarta 2023-2026 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.1  
Hubungan Tujuan dan Sasaran dengan Strategi BPSDM





## 1. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur

Guna mengantisipasi setiap tantangan dan tuntutan pelayanan publik aparatur DKI Jakarta maka peran pengembangan kompetensi menjadi sangat strategis, melalui berbagai jenis kediklatan, bimbingan teknis, sosialisasi, dan sebagainya; termasuk sertifikasi profesi SDM. Pengembangan SDM aparatur berbasis kompetensi merupakan suatu keharusan agar organisasi (birokrasi) dapat mewujudkan kinerja dan pelayanan publik yang lebih baik. Strategi peningkatan kuantitas dan kualitas pengembangan kompetensi SDM Aparatur dimaksudkan agar penyelenggaraan, antara lain, diklat di lingkungan BPSDM semakin dapat memenuhi kebutuhan (pengembangan) kompetensi pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam volume atau kapasitas layanan disertai peningkatan mutu yang semakin baik (excellent).

Hal paling mendesak dari perbaikan kinerja bidang pengembangan kompetensi adalah bagaimana meningkatkan kapasitas layanan berupa peningkatan peserta diklat di berbagai jenis diklat yang diselenggarakan maupun peningkatan jenis diklat itu sendiri sesuai kebutuhan dari waktu ke waktu, terdiri dari (yang sudah ada):

- a. Pengembangan Kompetensi Manajerial; meliputi: Pendidikan Kepemimpinan Administrator, Pendidikan Kepemimpinan Pengawas, dan Diklat Manajerial lainnya.
- b. Pengembangan Kompetensi Teknis dan Fungsional; Pengembangan Kompetensi bagi Jabatan Fungsional dilaksanakan melalui Diklat Fungsional, yaitu diklat pembentukan jabatan fungsional dan diklat penjenjangan jabatan fungsional.
- c. Pengembangan Kompetensi Pemerintahan; yaitu kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh Pegawai di setiap OPD. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan terpusat di BPSDM.
- d. Pengembangan Kompetensi Sosial Kultural; adalah kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap pegawai untuk memperkuat kompetensi sesuai dengan fungsi pekerjaannya. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan terpusat di BPSDM.

Untuk meningkatkan kompetensi dalam jabatan tersebut di lingkungan BPSDM Provinsi DKI Jakarta ditempuh melalui pendidikan dan pelatihan, Webinar, Podcast, seminar, kursus, penataran, magang, pertukaran pegawai dengan swasta, bimbingan teknis, sosialisasi, tugas belajar, workshop dan coaching untuk setiap jajaran dalam struktur organisasi BPSDM. Pengembangan kompetensi ini dilakukan untuk menambah kemampuan pegawai dalam melaksanakan pekerjaan sebagai pegawai yang profesional sesuai dengan tugas dan peranannya masing-masing.

Kompetensi yang dimiliki oleh pegawai harus dibuktikan dengan sertifikasi profesi yang kemudian digunakan sebagai salah satu dasar dalam pengangkatan jabatan dan pengembangan karier.

Proses pengembangan karir dalam suatu pendekatan formal yang diambil organisasi untuk memastikan bahwa orang-orang dengan kualifikasi dan pengalaman yang tepat tersedia pada saat dibutuhkan. Sehingga pengembangan karir dapat dikatakan suatu kondisi yang menunjukkan adanya peningkatan- peningkatan status seseorang dalam organisasi dalam jalur karir yang telah ditetapkan.

Adapun kebijakan dalam upaya mencapai tujuan, sasaran, dan strategi BPSDM Provinsi DKI Jakarta yang selanjutnya akan menjadi landasan dalam merumuskan arah kebijakan, dirumuskan sebagai berikut:

- a. Optimalisasi pemetaan kebutuhan diklat dan target rekrutmen peserta diklat;
- b. Peningkatan mutu penyelenggaraan pengembangan SDM;
- c. Adanya kerja sama pengembangan kompetensi SDM dengan Lembaga Dalam dan Luar Negeri, Perguruan Tinggi, Lembaga Pelatihan dan Sektor Publik;
- d. Penetapan standar kompetensi pada seluruh jabatan (JFT dan non JFT)
- e. Peningkatan kualitas uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

## **2. Optimalisasi Dukungan Kelembagaan dan Peningkatan Mutu Pengembangan Kompetensi Berstandar Global**

Agar pengembangan kompetensi menghasilkan SDM aparatur (alumni diklat) yang semakin professional dalam mengemban tugas dan fungsi organisasi di masing- masing OPD maka bidang pengembangan kompetensi harus didukung dengan kapasitas kelembagaan yang berstandar tinggi, termasuk upaya-upaya penjaminan mutunya. Strategi optimalisasi dukungan kelembagaan dan peningkatan mutu pengembangan kompetensi berstandar global pada dasarnya dimaksudkan untuk menghantarkan layanan BPSDM berkelas internasional sebagaimana apa yang dimaksud sebagai government university.

Manajemen SDM harus dilakukan secara profesional. BPSDM Provinsi DKI Jakarta sebagai unit kerja yang bertugas melakukan peningkatan kompetensi pegawai, harus menyelenggarakan kebijakan peningkatan kapasitas kelembagaan. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka memberikan motivasi, penyegaran dan pengembangan kompetensi dan kapasitas serta meningkatkan kualitas pelayanan sebagai abdi negara di lingkungan BPSDM Provinsi DKI Jakarta.

Peningkatan standarisasi dan penjaminan mutu dimaksudkan untuk dapat mendukung layanan yang diselenggarakan oleh bidang pengembangan kompetensi melalui perbaikan prosedur perumusan kebijakan teknis, pembinaan, dan pelaksanaan di bidang standarisasi penjaminan mutu agar peserta diklat dapat direkrut semakin banyak dengan pengerahan sumber daya organisasi yang semakin efisien. Upaya-upaya dimaksud juga termasuk memanfaatkan seoptimal mungkin kearifan teknologi informasi dalam seluruh tahapan pengelolaan diklat (termasuk pelaksanaan), mulai dari persiapan, pendaftaran hingga diklat berakhir.

Untuk terus mengenali berbagai area perbaikan atau peningkatan kualitas diklat, hal penting yang dilakukan adalah terus memperbaiki atau mengefektifkan monitoring dan evaluasi, tidak saja pada keseluruhan proses penyelenggaraan pengembangan kompetensi yang dilakukan oleh BPSDM melalui bidang-bidang pengembangan; tak kalah penting juga memantau dampak diklat terhadap kinerja dan perbaikan layanan pegawai DKI Jakarta.

Upaya atau dukungan lain yang tak kalah penting adalah dalam pengembangan kapasitas lembaga yaitu rangkaian upaya untuk meningkatkan kemampuan organisasi dan bagian-bagian yang ada di dalamnya untuk menjadi organisasi yang efektif, dan efisien; termasuk upaya-upaya berkelanjutan agar BPSDM menjadi institusi pengembang SDM berskala internasional. Pengembangan kapasitas kelembagaan menekankan pada pemberdayaan individu dan organisasi serta mengharuskan pendekatan sistematis yang dipertimbangkan dalam merancang perumusan strategi dan program BPSDM Provinsi DKI Jakarta. Kapasitas kelembagaan dalam hal ini mencakup sumberdaya, pengetahuan, dan proses yang digunakan organisasi tersebut untuk mencapai tujuannya. Kapasitas Kelembagaan Ini terdiri atas fisik, infrastruktur, teknologi, sumberdaya keuangan, kepemimpinan strategis, program dan manajemen serta jaringan dan hubungan dengan organisasi lain. Kapasitas lembaga pada akhirnya akan mempengaruhi kinerja organisasi tersebut. Dengan adanya pengembangan kapasitas lembaga pengembangan SDM diharapkan kinerja BPSDM Provinsi DKI Jakarta akan menjadi lebih baik dan mampu mengatasi permasalahan perangkat daerah serta pembangunan daerah Provinsi DKI Jakarta.

Salah satu hal yang terpenting dalam pemberdayaan kapasitas kelembagaan adalah menyangkut aspek kepegawaian, dimana kondisi pembinaan pola karier aparatur saat ini tidak didasarkan pada standar kompetensi baik persyaratan umum, persyaratan manajerial, dan persyaratan teknis, sehingga berdampak kurang positif terhadap kinerja instansi serta pemberdayaan kapasitas kelembagaan perangkat daerah.

Pembentukan kelembagaan perangkat daerah, dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah, kebijakan yang diambil salah satunya adalah menjadikan UPT PPKK menjadi BLUD JPPC. Dari segenap upaya peningkatan kapasitas kelembagaan BPSDM, hal paling mendesak dan menjadi urgent adalah penyediaan gedung diklat terpadu yang hingga saat ini masih belum terwujud; yang antara lain adalah untuk meningkatkan tampungan peserta dalam bentuk penambahan kelas, asrama, dan lain-lain. Penyediaan gedung terpadu dimaksud juga secara langsung menjadi pemicu kinerja widyaiswara agar dapat menjalankan tugas dan fungsi menjadi lebih baik karena antara lain perpindahan ruang mengajar dari satu acara kelas ke kelas berikutnya menjadi lebih efisien.

Melihat segala sumber daya dan kapabilitas yang dimiliki BPSDM Provinsi DKI Jakarta dapat dipastikan BPSDM Provinsi DKI Jakarta mampu mewujudkan pusat pengembangan kompetensi yang bertaraf internasional (world class melalui government university). Pada gambar tersebut tampak pula bahwa kinerja BPSDM Provinsi DKI Jakarta terus meningkat pesat, mulai dari diklat masa lalu yang sederhana kemudian dikembangkan sedemikian rupa dengan segala modal internal yang dimiliki (SDM: Pengelola Diklat + WI; Sertifikasi WI, Asesor, dan Akreditasi; Sarpras: CAT, Asrama, R.Kelas, R.Inovasi; Program: prioritas SC dan CB; Kelembagaan: SOP/Standarisasi Struktur organisasi) menjadikan BPSDM Provinsi DKI Jakarta menjadi smart diklat melalui berbagai pelaksanaan diklat berbasis IT (SIM Diklat: pendaftaran, e-coaching, Cop; E-evaluasi; Metode IT based; Diklat jarak jauh (e-learning). Keberhasilan ini didukung pula dengan diperolehnya sertifikasi centric melalui pelaksanaan kegiatan uji kompetensi dan sertifikasi jabatan negeri (2016); LSP 1 (2017); usulan kebijakan karier pelaksana; (SQ Award) Sertifikasi Award sebagai acuan tingkat nasional serta pengembangan knowledge management

# TUJUAN DAN SASARAN BPSDM TAHUN 2023

---

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja BPSDM, Program dan Kegiatan



### 3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

#### 3.1.1 Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023

Kebijakan Nasional yang menjadi salah satu rujukan bagi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 adalah Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 dengan tema “Peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan”.

Terdapat tujuh arah kebijakan prioritas RKP 2023 antara lain yaitu:

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam hal kesehatan dan pendidikan;
3. Penanggulangan pengangguran yang disertai peningkatan decent job;
4. Pemulihan dunia usaha;
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan dalam rangka mendorong produktivitas;
6. Ekonomi hijau;
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar, antara lain air bersih dan sanitasi.

Merujuk kepada tujuh arah kebijakan prioritas, terdapat berkaitan secara langsung dengan tugas dan fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta selaku pengemban urusan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yaitu “Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam hal kesehatan dan pendidikan”

#### 3.1.2 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)

TPB/SDGs merupakan kerangka kerja pembangunan yang memiliki tiga dimensi pembangunan berkelanjutan, yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan. TPB/SDGs diformulasikan ke dalam 17 Goals, 169 Target/Sasaran, dan 241 Indikator. Dalam Gambar 3.1 terdapat rincian tujuh belas tujuan TPB/SDGs.



Gambar 3. 1 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs)

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta memiliki keterkaitan erat terhadap 1 (satu) tujuan dari 17 Tujuan TPB/SDGs. 1 tujuan tersebut yaitu tujuan nomor 16 :

Goals 16 – Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh – mendorong masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan bagi semua orang termasuk lembaga dan bertanggungjawab untuk seluruh kalangan, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan.

### 3.2 TUJUAN DAN SASARAN RANWAL RENJA BPSDM

Tujuan dan Sasaran Renja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2023 merujuk kepada Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026. Di mana tujuannya adalah mendukung RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026, dimana Sasaran RPD nya yaitu “Peningkatan Kompetensi ASN Dalam Rangka Menciptakan Agen Perubahan dan Penggerak Partisipasi Masyarakat”. Sehingga tujuan dan sasaran BPSDM Provinsi DKI Jakarta seperti yang terdapat dalam Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPSDM Tahun 2023-2026 terlampir :

Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPSDM Tahun  
2023-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke -			
				2023	2024	2025	2026
1.	Pengembangan Kompetensi Melalui Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Serta Peningkatan Knowledge Management	Peningkatan Kompetensi ASN Dalam Rangka Menciptakan Agen Perubahan dan Penggerak Partisipasi Masyarakat	Indeks sistem merit pada Aspek dan Sub Aspek lingkup BPSDM	31	31	31	31
2.			Nilai Dimensi Pengembangan Kompetensi	38.7	38.8	38.9	39



Sebagaimana Tujuan dan Sasaran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Tabel 3.1 dan isu-isu penting yang perlu diselesaikan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada tahun 2023, maka prioritas kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Tahun 2023 antara lain:

1. Program pengembangan kompetensi SDM;
2. Revitalisasi pengembangan sumber daya aparatur
3. Penguatan UPT PPKP – BLUD JPPC

### **3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN BPSDM**

Dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah, terdapat beberapa penyesuaian baik pada nomenklatur kegiatan, penambahan struktur Sub-Kegiatan, penggunaan kode rekening beserta kodefikasinya.

Seiring dengan adanya Peraturan tersebut, maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menginisiasi perubahan RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 sehingga dapat mengadaptasi struktur program dan kegiatan serta mengubah cascading kinerja yang berimplikasi pada penilaian AKIP Provinsi DKI Jakarta kedepannya. Implikasi dari perubahan RPJMD tersebut juga mengharuskan masing-masing Perangkat Daerah untuk menyusun Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk sisa masa Periode 2022-2026. Program pada Renja 2023 menggunakan Rancangan Perubahan RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019.

Program tersebut antara lain:

1. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia;
2. Program Kepegawaian Daerah (digunakan bersama oleh BPSDM dan BKD);
3. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi;



Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023 beserta Perkiraan Maju Tahun 2024 BPSDM terdapat dalam Tabel 3.2. Pada tahun 2023 terdapat 3 Program, 7 Kegiatan, 18 Sub Kegiatan, serta 91 Indikator Kinerja sub kegiatan pada 1 Sekretariat, 3 Bidang dan 2 UPT (termasuk UPT PPKKP yang berupa BLUD JPPC)

Untuk penetapan Sub-kegiatan yang mendukung Kegiatan Strategis Daerah (KSD) belum ditentukan karena belum ada pembahasan untuk hal ini.



# RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BPSDM TAHUN 2023





Rancangan Awal Rencana Kerja (Ranwal Renja) BPSDM Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 terdiri dari program, kegiatan, sub kegiatan, dan anggaran yang pada fase Ranwal ini masih menggunakan data pada Rancangan Perubahan Renstra BPSDM Tahun 2023 yang telah diinput pada Sistem Informasi Perencanaan Jangka Menengah (SIPJM) Perubahan RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 . Ranwal Renja tersebut tersaji dalam Tabel 4.1 di bawah ini.

Tabel 4. 1 Rencana Kerja PD/UKPD BPSDM Tahun 2023

Perangkat Daerah/ Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
<b>TERSAJI DALAM LAMPIRAN B RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD/UKPD BPSDM TAHUN 2023</b>										



# PENUTUP



## PENUTUP

Dokumen Renja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2023 merupakan perencanaan kerja untuk periode tahun 2023. Renja merupakan penjabaran dari Renstra Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2023-2026 dengan mempedomani RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023. Fungsi Renja 2023 adalah sebagai pedoman operasional dalam melaksanakan program dan kegiatan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai upaya mencapai tujuan dan sasaran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Selain itu juga dalam rangka menunjang keberhasilan Kegiatan Strategis Daerah (KSD) Provinsi DKI Jakarta.

Sebagai pedoman kerja, pelaksanaan Renja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia ditetapkan kaidah-kaidah sebagai berikut:

1. Seluruh aparatur Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta wajib melaksanakan program dan kegiatan dalam Renja Tahun 2023 sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Anggaran pelaksanaan Renja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2023 akan dijabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023;
3. Pelaksanaan DPA Tahun 2023 akan dimonitoring setiap bulan dan dilaporkan kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia setiap 3 bulan. Pada akhir tahun pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2023 akan dievaluasi sebagai bahan penyusunan Renja 2024.

Selanjutnya, Renja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 akan dijabarkan ke dalam Rencana Aksi 2023 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2023.

Jakarta, 2022  
Kepala BPSDM Provinsi  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

Mochamad Miftahulloh Tamary  
NIP 197812131997111001



**LAMPIRAN  
REKAPITULASI  
EVALUASI HASIL  
PELAKSANAAN RENJA  
BPSDM 2021**







Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Program dan (Output) Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Proyeksi Realisasi dan Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Capaian (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Capaian Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
A 5		Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan									
A 5 03		Kepegawaian									
A 5 03 02		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH									
A 5 03 02 1.03		Pengembangan Kompetensi ASN									
A 5 03 02 1.03 04		Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN									
A 5 03 02 1.03 04 001		Pengiriman Pegawai Tugas Belajar	Jumlah peserta Pengiriman Pegawai Tugas Belajar	511	319	100	138	138	100	557	109,00%
A 5 03 02 1.03 04 000		Seleksi Calon Pegawai Tugas Belajar	Jumlah peserta Seleksi Calon Pegawai Tugas Belajar	630	541	0	0	100	300	841	133,49%
A 5 03 02 1.03 04 000		Diklat Internship terkait Kerjasama Sister City	Jumlah laporan peserta yang mengikuti Diklat Internship terkait Kerjasama Sister City	10	0	0	0	100	0	0	0,00%
A 5 04		Pendidikan Dan Pelatihan									
A 5 04 02		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA									
A 5 04 02 1.01		Pengembangan Kompetensi Teknis									
A 5 04 02 1.01 02		Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi									



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Program dan (Output) Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Proyeksi Realisasi dan Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022							
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Capaian (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Capaian Renstra (%)						
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)						
	Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum															
A	5	04	02	1.01	02	001	pengembangan e-learning	Jumlah pengembangan e-learning	23	15	5	5	100	5	25	108,69%
A	5	04	02	1.01	02	002	Revitalisasi Pengembangan Sumber Daya Aparatur	Jumlah Grand Design Jakarta Corporate University	2	0	1	1	100	1	2	100,00%
A	5	04	02	1.01	02	003	penyusunan kurikulum diklat	Jumlah penyusunan kurikulum diklat	23	16	3	14	467	10	40	173,91%
A	5	04	02	1.01	02	004	Penyusunan Modul Diklat	Jumlah penyusunan modul diklat	108	74	10	10	100	24	108	100,00%
A	5	04	02	1.01	02	000	master plan pengembangan kompetensi ASN	Jumlah master plan pengembangan kompetensi ASN	2	1	0	0	100	1	1	100,00%
A	5	04	02	1.01	003		Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum									



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Program dan (Output) Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Proyeksi Realisasi dan Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Capaian (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Capaian Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
A 5 04 02 1.01 003 001	Diklat Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah Peserta Diklat Pelayanan Terpadu Satu Pintu	810	570	120	123	102,5	120	813	100,37%
A 5 04 02 1.01 003 002	Diklat Manajemen BLUD	Jumlah Peserta Diklat Manajemen BLUD	960	420	270	311	115	270	1001	104,27%
A 5 04 02 1.01 003 003	Diklat Manajemen Penanggulangan Bencana	Jumlah Peserta Diklat Manajemen Penanggulangan Bencana	390	210	90	121	134	90	421	107,94%
A 5 04 02 1.01 003 004	Diklat Komunikasi Publik	Jumlah Peserta Diklat Komunikasi Publik	550	300	150	183	122	150	633	115,09%
A 5 04 02 1.01 003 005	Diklat Teknis Pelayanan Terpadu Penyandang Disabilitas	Jumlah Peserta Diklat Teknis Pelayanan Terpadu Penyandang Disabilitas	560	360	120	120	100	120	600	107,14%
A 5 04 02 1.01 003 006	Diklat Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan Berbasis Akrua	Jumlah Peserta Diklat Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan Berbasis Akrua	480	300	90	96	107	90	486	101,25%
A 5 04 02 1.01 003 007	Diklat Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Peserta Diklat Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah	750	600	90	94	104	90	784	104,53%
A 5 04 02 1.01 003 008	Diklat Manajemen Proyek	Jumlah Peserta Diklat Manajemen Proyek	220	120	60	60	100	60	240	109,09%
A 5 04 02 1.01 003 009	Diklat Manajemen Strategik	Jumlah Peserta Diklat Manajemen Strategik	190	90	60	60	100	60	210	110,52%
A 5 04 02 1.01 003 010	Diklat Change Management and Inovation	Jumlah Peserta Diklat Change Management and Inovation	330	180	90	90	100	90	360	109,09%
A 5 04 02 1.01 003 011	Diklat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Jumlah Peserta Diklat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	590	390	120	123	102,5	120	633	107,28%
A 5 04 02 1.01 003 012	Pengiriman Kediklatan	Jumlah Peserta Pengiriman Kediklatan	726	1038	48	124	258	48	1210	166,67%
A 5 04 02 1.01 003 013	Seminar Internasional	Jumlah Peserta Seminar Internasional	130	0	200	200	100	200	200	153,85%



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Program dan (Output) Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Proyeksi Realisasi dan Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Capaian (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Capaian Renstra (%)
A 5 04 02 1.01 003 014	Webinar Urban Regeneration	Jumlah yang mengikuti Webinar Urban Regeneration	130	0	200	200	100	200	200	153,85%
A 5 04 02 1.01 003 000	Diklat Pengelolaan Penatausahaan Keuangan	Jumlah peserta diklat pengelolaan penatausahaan keuangan	510	300				210	510	100,00%
A 5 04 02 1.01 003 000	Diklat Penyelesaian Sengketa Hukum Bagi Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah peserta diklat penyelesaian sengketa hukum bagi panitia pengadaan barang dan jasa	210	180				30	210	100,00%
A 5 04 02 1.01 003 000	Diklat Teknis Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan serta Estate Management	Jumlah peserta diklat teknis pemerintahan kecamatan dan kelurahan serta estate management	630	600				30	600	100,00%
A 5 04 02 1.01 003 000	Workshop Profesionalisme ASN bagi Tenaga Pendidik	Jumlah peserta Workshop profesionalisme ASN bagi Tenaga Pendidik	810	750				60	750	100,00%
A 5 04 02 1.01 003 000	Diklat Manajemen Sumber Daya Manusia	Jumlah peserta diklat manajemen sumber daya manusia	450	420				30	420	100,00%
A 5 04 02 1.01 003 000	Diklat Sekretaris	Jumlah peserta Diklat Sekretaris	420	360				60	360	100,00%
A 5 04 02 1.01 003 000	Diklat Keprotokolan	Jumlah peserta diklat keprotokolan	270	240				30	240	100,00%
A 5 04 02 1.01 003 000	Diklat Bina Damai	Jumlah peserta Diklat Bina Damai	630	600				30	600	100,00%
A 5 04 02 1.01 003 000	Diklat Reformasi Birokrasi	Jumlah peserta Diklat Reformasi Birokrasi	180	0					0	0,00%
A 5 04 02 1.01 003 000	Bimtek Pengelolaan Aset	Jumlah peserta diklat/bimtek pengelolaan aset	250	0					0	0,00%
A 5 04 02 1.01 003 000	Diklat Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah peserta diklat penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah	30	0					0	0,00%
A 5 04 02 1.01 003 000	Kerjasama Kediklatan	Jumlah peserta Kerjasama Kediklatan	1.350	1.150				200	1150	100,00%



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Program dan (Output) Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Proyeksi Realisasi dan Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Capaian (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Capaian Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
A 5 04 02 1.01 003 000	Diklat Teknis Perundang-Undangan	Jumlah peserta diklat teknis perundang-undangan	330	300				30	300	100,00%
A 5 04 02 1.01 003 000	Diklat Revolusi Mental	Jumlah peserta diklat revolusi mental	180	150				30	150	100,00%
A 5 04 02 1.01 003 000	Diklat Pelayanan Prima	Jumlah peserta diklat pelayanan prima	960	900				60	900	100,00%
A 5 04 02 1.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional								
A 5 04 02 1.02 01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional									
A 5 04 02 1.02 01 001	Penyusunan analisa kesenjangan kompetensi		4	2	1	1	100	1	4	100,00%
A 5 04 02 1.02 01 002	Penyusunan Standar	Terlaksananya Penyusunan Standar Kompetensi	20	12	4	5	125	4	21	105,00%



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Program dan (Output) Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Proyeksi Realisasi dan Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Capaian (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Capaian Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Kompetensi Jabatan Dalam Rangka Sertifikasi Profesi								
A	5 04 02 1.02 01 000	konsultasi pengembangan kompetensi	15	10	0	0	100	5	15	100,00%
A	5 04 02 1.02 01 000	Pemetaan Kompetensi Pegawai	600	600	0	0	100		600	100,00%
<b>A</b>	<b>5 04 02 1.02 03</b>	<b>Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota</b>								
A	5 04 02 1.02 03 001	Uji Kompetensi dan Sertifikasi Profesi	4.700	2014	450	1100	244	1.586	4700	100,00%
<b>A</b>	<b>5 04 02 1.02 04</b>	<b>Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar</b>								
A	5 04 02 1.02 04 001	Peningkatan Kompetensi Widyaiswara	33	33	40	46	115	33	66	200%
A	5 04 02 1.02 04 002	Penjaminan Mutu dan SMM ISO 9001:2015	6	3	2	2	100	1	6	100,00%
A	5 04 02 1.02 04 003	Akreditasi Kediklatan	15	8	5	5	100	5	18	120,00%
A	5 04 02 1.02 04 004	Knowledge Management	30	15	5	5	100	10	30	100,00%



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Program dan (Output) Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Proyeksi Realisasi dan Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022							
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Capaian (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Capaian Renstra (%)						
1							2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
A	5	04	02	1.02	04	000	Diklat Penulisan Karya Ilmiah bagi Widyaiswara	Jumlah peserta Diklat Penulisan Karya Ilmiah bagi Widyaiswara	60	30	0	0	100	30	60	100,00%
A	5	04	02	1.02	07		<b>Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan</b>									
A	5	04	02	1.02	07	001	Diklat Bendahara Penerimaan	Jumlah peserta Diklat Bendahara Penerimaan	120	60	90	96	107	30	186	155,00%
A	5	04	02	1.02	07	002	Diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil	Jumlah peserta diklat penyidik pegawai negeri sipil	307	282	15	15	100	15	312	101,62%
A	5	04	02	1.02	07	003	Diklat Kepemimpinan Tingkat III	Jumlah peserta diklat kepemimpinan TK. III	360	300	30	36	120	30	366	101,67%
A	5	04	02	1.02	07	004	Diklat Kepemimpinan Tingkat IV	Jumlah peserta diklat kepemimpinan TK. IV	600	510	60	74	123	60	644	107,33%
A	5	04	02	1.02	07	005	Pelatihan Dasar CPNS Golongan I, II dan III	Jumlah peserta Pelatihan Dasar CPNS Golongan I, II dan III	3.652	2.860	400	719	179	400	3979	108,95%
A	5	04	02	1.02	07	006	Diklat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa dan Ujian Sertifikasi	Jumlah peserta diklat keahlian pengadaan barang/jasa dan ujian sertifikasi	930	540	0	0	100	390	930	100,00%
A	5	04	02	1.02	07	000	diklat Dasar Pol PP bagi Staf	Jumlah yang mengikuti diklat Dasar Pol PP bagi Staf	270	240	0	0	100	30	270	100,00%
A	5	04	02	1.02	07	000	Diklat Manajemen Sekolah	Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat Manajemen Sekolah	330	300	0	0	100	30	300	100,00%
A	5	04	02	1.02	07	000	Diklat Kepala Sekolah	Jumlah peserta diklat calon kepala sekolah	1.260	900	0	0	100	360	1260	100,00%



Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Program dan (Output) Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Proyeksi Realisasi dan Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022	
											Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Capaian (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Capaian Renstra (%)
1							2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
A	5	04	02	1.02	07	000	Diklat Pengawas Sekolah	Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat Pengawas Sekolah	90	60				30	90	100,00%
A	5	04	02	1.02	07	000	Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III (K1/K2)	Jumlah peserta diklat prajabatan golongan I, II dan III (K1/K2)	3.031	3.006				25	3031	100,00%
A	5	04	02	1.02	07	000	Diklat Capacity Building	Jumlah peserta diklat capacity building	420	390				30	420	100,00%
A	5	04	02	1.02	07	000	Diklat Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri	Jumlah peserta diklat kepemimpinan pemerintahan dalam negeri	30	0					0	0,00%
A	5	04	02	1.02	07	000	Diklat Kepemimpinan Kepala Sekolah	Jumlah peserta diklat kepemimpinan kepala sekolah	60	0					0	0,00%
A	5	04	02	1.02	07	000	Diklat Pengelolaan Barang Daerah	Jumlah peserta Diklat Pengelolaan Barang Daerah	930	900				30	930	100,00%
A	5	04	02	1.02	07	000	Diklat Bendahara Pengeluaran	Jumlah peserta Diklat Bendahara Pengeluaran	810	780				30	810	100,00%
A	5	04	02	1.02	07	000	Diklat TOF/TOC	Jumlah peserta diklat TOF/TOC	60	30				30	60	100,00%
A	5	04	02	1.02	07	000	Diklat Training Officer Course	Jumlah peserta diklat Training officer course	60	30				30	60	100,00%
A	5	04	02	1.02	07	000	Diklat Training of Trainer	Jumlah peserta diklat Training of Trainer	90	60				30	90	100,00%
A	5	04	02	1.02	07	000	Diklat Teknis Pertanahan	Jumlah yang mengikuti diklat teknis pertanahan	630	600				30	630	100,00%
A	5	04	02	1.02	07	000	Diklat Dasar Kereta Api Perkotaan	Jumlah yang mengikuti diklat dasar kereta api perkotaan	120	90				30	120	100,00%
A	5	04	02	1.02	07	000	Diklat Kereta Api Perkotaan (Penguji)	Jumlah yang mengikuti Diklat Kereta Api Perkotaan (Penguji)	120	90				30	120	100,00%
A	5	04	02	1.02	07	000	Diklat Hukum Konstruksi	Jumlah peserta Diklat Hukum konstruksi	120	90				30	120	100,00%
A	5	04	02	1.02	07	000	Diklat Pengelolaan Arsip Dinamis	Jumlah peserta diklat pengelolaan arsip dinamis	90	60				30	90	100,00%
A	X	XX	01				<b>Program Penunjang Urusan</b>									





Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Program dan (Output) Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Proyeksi Realisasi dan Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022					
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Capaian (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Capaian Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
	<b>Pemerintahan Daerah Provinsi</b>													
<b>A</b>	<b>X</b>	<b>XX</b>	<b>01</b>	<b>1.06</b>	<b>06</b>									
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>													
<b>A</b>	<b>X</b>	<b>XX</b>	<b>01</b>	<b>1.06</b>	<b>02</b>									
	<b>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>													
A	X	XX	01	1.06	02	001	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Penyediaan Alat Tulis Kantor	4	4	100	4		
A	X	XX	01	1.06	02	002	Penyediaan Peralatan Penunjang Pendidikan dan Pelatihan	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Pengadaan Modal Penunjang Pendidikan dan Pelatihan	4	4	100	4	4	100
A	X	XX	01	1.06	02	003	Pengadaan Barang Pakai Habis Penunjang Pendidikan dan Pelatihan	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Pengadaan Barang Pakai Habis Penunjang Pendidikan dan Pelatihan	4	4	100	4		
A	X	XX	01	1.06	02	000	Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyelenggaraan Diklat	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyelenggaraan Diklat	4	4	100			
A	X	XX	01	1.06	05		<b>Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan</b>							
						001	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	Nilai Kepuasan Terhadap Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	4	4	100	4		
<b>A</b>	<b>X</b>	<b>XX</b>	<b>01</b>	<b>1.06</b>	<b>07</b>		<b>Penyediaan Bahan/Material</b>							
A	X	XX	01	1.06	07	001	Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus	Jumlah unit KDO yang kebutuhan BBM nya terpenuhi	15	15	100	15		
<b>A</b>	<b>X</b>	<b>XX</b>	<b>01</b>	<b>1.06</b>	<b>08</b>		<b>Fasilitas Kunjungan Tamu</b>							



Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Program dan (Output) Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Proyeksi Realisasi dan Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022	
											Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Capaian (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Capaian Renstra (%)
1							2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
A	X	XX	01	1.06	08	001	Penerimaan Tamu Konsultasi, Studi Banding dan Kunjungan Kerja	Jumlah Pelaksanaan Penerimaan Tamu Konsultasi, Studi Banding dan Kunjungan Kerja						30		
A	X	XX	01	1.06	08	002	Penyediaan makanan dan minuman	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Penyediaan Makanan dan Minuman			4	4	100	4		
A	X	XX	01	1.06	09		<b>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</b>									
A	X	XX	01	1.06	09	001	Pengelolaan Sistem Informasi BPSDM	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Pengelolaan Sistem Informasi BPSDM			4	4	100	4		
A	X	XX	01	1.08			<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>									
A	X	XX	01	1.08	02		<b>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</b>									
A	X	XX	01	1.08	02	001	Penyediaan Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI)	Nilai Kepuasan Terhadap Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			4	4	100	4		
A	X	XX	01	1.08	03		<b>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>									
A	X	XX	01	1.08	03	001	Penyediaan Sewa Mesin Foto Copy	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Penyediaan Sewa Mesin Foto Copy			4	4	100	4		
A	X	XX	01	1.08	04		<b>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</b>									



Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Program dan (Output) Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Proyeksi Realisasi dan Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022	
											Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Capaian (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Capaian Renstra (%)
1							2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
A	X	XX	01	1.08	04	001	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Keamanan Kantor			4	4	100	4		
A	X	XX	01	1.08	04	002	Penyediaan Jasa Bidang Teknis dan Penunjang	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Penyediaan Jasa Bidang Teknis dan Penunjang			4	4	100	4		
A	X	XX	01	1.08	04	000	Pengadaan Jasa Pencucian Linen	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Pengadaan Jasa Pencucian Linen			0	0	100			
A	X	XX	01	1.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
A	X	XX	01	1.09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
A	X	XX	01	1.09	02	001	Pemeliharaan KDO/KDO Khusus	Jumlah unit KDO yang berfungsi dan laik jalan			15	15	100	15		
A	X	XX	01	1.09	02	002	Penyediaan jasa perizinan KDO/KDO khusus	Jumlah unit KDO yang Dokumen perizinannya lengkap dan berlaku serta laik jalan dan berfungsi			15	15		15		
A	X	XX	01	1.09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									



Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Program dan (Output) Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Proyeksi Realisasi dan Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022	
											Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Capaian (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Capaian Renstra (%)
1							2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
A	X	XX	01	1.09	06	001	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kerja	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja						4		
<b>A</b>	<b>X</b>	<b>XX</b>	<b>01</b>	<b>1.09</b>	<b>09</b>		<b>Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</b>									
A	X	XX	01	1.09	09	001	Penyediaan jasa Kebersihan Kantor	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Penyediaan Perlengkapan Petugas PJLP Kebersihan			4	4	100	4		
A	X	XX	01	1.09	09	002	Penyediaan perlengkapan Petugas PJLP Kebersihan	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			4	4	100	4		
<b>A</b>	<b>X</b>	<b>XX</b>	<b>01</b>	<b>1.10</b>			<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>									
<b>A</b>	<b>X</b>	<b>XX</b>	<b>01</b>	<b>1.10</b>	<b>01</b>		<b>Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD</b>									
A	X	XX	01	1.10	01	001	Peningkatan Layanan Umum Daerah	Jumlah Peserta Peningkatan Layanan Umum Daerah	270	0	30	30	100	140	170	62,96%



**LAMPIRAN**  
**RENCANA KERJA DAN**  
**PENDANAAN BPSDM**  
**TAHUN 2023**





Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1							2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	5						Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan								
A	5	03					Kepegawaian								
A	5	03	02				PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH								
A	5	03	02	1.03			Pengembangan Kompetensi ASN								
A	5	03	02	1.03	04		Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN								
A	5	03	02	1.03	04	001	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	DKI Jakarta	100	19.913.092.199	APBD		100	21.913.092.199
A	5	04					Pendidikan Dan Pelatihan								
A	5	04	02				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA								
A	5	04	02	1.01			Pengembangan Kompetensi Teknis								
A	5	04	02	1.01	01		Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	DKI Jakarta	2	930.800.000	APBD		2	1.100.800.000
A	5	04	02	1.01	02		Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan	DKI Jakarta	1	175.000.000	APBD		1	275.000.000



Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum							
A	5	04	02	1.01	03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	DKI Jakarta	250	20.171.551.746	APBD		250	21.186.551.746
A	5	04	02	1.01	04	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi	DKI Jakarta	2	50.000.000	APBD		2	60.000.000
<b>A</b>	<b>5</b>	<b>04</b>	<b>02</b>	<b>1.02</b>		<b>Pengembangan Kompetensi Teknis</b>								
A	5	04	02	1.02	01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi,	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi,	DKI Jakarta	1	100.000.000	APBD		1	150.000.000



Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1							2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional								
A	5	04	02	1.02	02		Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi	DKI Jakarta	1	250.000.000	APBD		1	350.000.000
A	5	04	02	1.02	03		Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi	DKI Jakarta	250	475.000.000	APBD		250	525.000.000
A	5	04	02	1.02	04		Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	DKI Jakarta	1	15.000.000	APBD		1	25.000.000
A	5	04	02	1.02	07		Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	DKI Jakarta	2500	35.841.390.641	APBD		2500	38.448.890.641
A	5	04	01				<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>								





Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>A</b>	<b>5</b>	<b>04</b>	<b>01</b>	<b>1.02</b>		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>								
A	5	04	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	DKI Jakarta	100	71.553.164.568	APBD		100	87.148.781.940
<b>A</b>	<b>5</b>	<b>04</b>	<b>01</b>	<b>1.05</b>		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>								
A	5	04	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	DKI Jakarta	1	146.789.625	APBD		1	181.468.588
<b>A</b>	<b>5</b>	<b>04</b>	<b>01</b>	<b>1.06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>								
A	5	04	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	DKI Jakarta	1	2.912.896.271	APBD		1	3.304.185.898
A	5	04	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	DKI Jakarta	1	113.740.000	APBD		1	135.114.000
A	5	04	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	DKI Jakarta	1	605.156.211	APBD		1	765.671.832
A	5	04	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	DKI Jakarta	1	68.340.800	APBD		1	85.174.880
A	5	04	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	DKI Jakarta	1	260.748.000	APBD		1	289.374.000
A	5	04	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DKI Jakarta	12	750.000.000	APBD		12	400.000.000
A	5	04	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	DKI Jakarta	1	128.295.211	APBD		1	151.124.732
<b>A</b>	<b>5</b>	<b>04</b>	<b>01</b>	<b>1.07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>								
A	5	04	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	DKI Jakarta	1	69.833.292.163	APBD		1	74.127.198.999



Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>A</b>	<b>5</b>	<b>04</b>	<b>01</b>	<b>1.08</b>			<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								
A	5	04	01	1.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	DKI Jakarta	12	1.592.725.340	APBD		12	1.691.997.874
A	5	04	01	1.08	03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	DKI Jakarta	12	193.842.000	APBD		12	253.226.200
A	5	04	01	1.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	DKI Jakarta	12	1.787.200.280	APBD		12	1.999.920.308
<b>A</b>	<b>5</b>	<b>04</b>	<b>01</b>	<b>1.09</b>			<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								
A	5	04	01	1.09	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	DKI Jakarta	10	90.174.565	APBD		10	105.111.223
A	5	04	01	1.09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	DKI Jakarta	30	232.561.746	APBD		30	281.399.713